



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 29 TAHUN 2016

T E N T A N G

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, diperlukan pedoman pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kuningan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak Sebagai Bendahara Umum Daerah.
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD, adalah badan yang bertindak sebagai PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
- f. Dana Cadangan adalah Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2023.

BAB II

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Dana Cadangan merupakan tanggung jawab Bupati.
- (2) Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan dilakukan secara bertahap.

Pasal 3

- (1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disimpan pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.
- (2) Untuk penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKAD harus membuka Rekening pada PT. Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk. Cabang Kuningan Atas Nama " Bupati untuk Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Kuningan Jalan Siliwangi No. 88 Kuningan ".

Pasal 4

- (1) Dalam pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPKAD wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPKAD wajib menyiapkan bahan laporan Bupati berkenaan dengan perkembangan Dana Cadangan untuk disampaikan kepada DPRD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal : 1-12-2016

KARAP KORDINASI DAS MUKUM			
DEBAT	RESE	TGL.	KFI.



Diundangkan di Kuningan

Pada tanggal : 1-12-2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET:
KASUBAG / KASUBBID			
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN			
SEKRETARIS DAERAH			